

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari keseluruhan penelitian yang terdiri dari lima bagian, yaitu latar belakang penelitian yang menjadi titik tolak penelitian, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, serta struktur isi disertasi. Uraian setiap bagian secara runut disajikan sebagai berikut.

A. Latar Belakang Penelitian

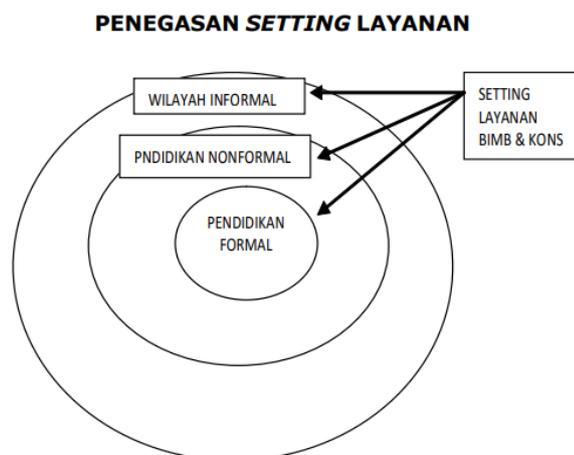
Layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan yang esensial dalam konteks pendidikan. Borders & Drury (1992) menyatakan bahwa intervensi bimbingan dan konseling mempunyai dampak substansial terhadap perkembangan pribadi dan pendidikan siswa. Meskipun demikian, harus disadari bahwa produk pendidikan yang dihasilkan secara maksimal bukan semata-mata hasil dari bimbingan dan konseling saja, akan tetapi keberadaan layanan bimbingan dan konseling memegang peranan yang cukup berarti dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Upaya memfasilitasi perkembangan siswa harus dilakukan secara sinergis antara pendekatan pembelajaran (*instructional approach*) dengan pendekatan bimbingan dan konseling (*psycho-educational approach*).

Secara umum, peran bimbingan dan konseling di sekolah sebagai upaya strategis dalam memandirikan siswa dan mengembangkan potensinya secara optimal perlu dikaitkan dengan pengembangan sumber daya manusia agar mampu menjawab tantangan kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan layanan bimbingan dan konseling tersebut, maka diperlukan sebuah program bimbingan dan konseling sebagai pedoman atau panduan untuk memverifikasi kelebihan, kekurangan, dan dampak dari layanan bimbingan dan konseling terhadap perubahan tingkah laku siswa di sekolah.

Program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah disusun berdasarkan pedoman pada kurikulum yang diterapkan oleh masing-masing sekolah. Pedoman tersebut dituangkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan disusun untuk menjadi pegangan bagi para pelaksana program

(Suherman, 2011). Program layanan bimbingan dan konseling diartikan sebagai seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Program bimbingan dan konseling sekolah tidak hanya bersifat komprehensif dalam ruang lingkup, namun juga harus bersifat preventif dalam desain, dan bersifat pengembangan dalam tujuannya (*comprehensive in scope, preventive in design, and developmental in nature*) (Bowers & Hatch, 2000).

Layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan sarana bantuan bagi siswa menuju arah perkembangan yang lebih baik. Tuntutan yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling saat ini sangat kompleks. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang holistik. Menurut Suherman (2011) tujuan utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah memberikan dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Dengan demikian, guru bimbingan dan konseling harus memahami konsep, fungsi, prinsip, dan asas bimbingan dan konseling, serta ruang lingkup atau layanan-layanan yang harus diberikan terhadap siswanya. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga harus memahami *setting* layanan bimbingan dan konseling itu diberikan. Posisi *setting* layanan dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut:



Gambar 1.1.
Penegasan terhadap Setting Layanan BK dalam Pendidikan

Guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan dan konseling adalah pendidik sama halnya seperti guru mata pelajaran, namun ekspektasi kinerja guru bimbingan dan konseling berbeda dengan guru mata pelajaran. Guru bimbingan dan konseling harus tetap sadar bahwa rujukan normatif dari ekspektasi kinerjanya adalah “memandirikan konseli” dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar/akademik, dan karir melalui fasilitasi pengembangan berbagai kapasitasnya secara optimal (*optimum capacity development*) (Otwell & Mullis, 1997; Paisley & Hayes, 2003). Layanan bimbingan dan konseling yang diampu oleh guru bimbingan dan konseling bertujuan untuk memandirikan individu yang normal dan sehat dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan berbagai keputusan terbaik dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar/akademik, dan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera dan peduli terhadap kemaslahatan umum (Lapan, Gysbers, & Sun, 1997).

Pengembangan kompetensi hidup peserta didik (siswa) memerlukan sistem layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran pada mata pelajaran atau bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga layanan khusus yang bersifat psiko-edukatif yaitu melalui layanan bimbingan dan konseling yang dapat mengembangkan potensi dan kompetensi hidup yang dimilikinya. Hal ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Layanan bimbingan dan konseling yang diberikan guru bimbingan dan konseling di sekolah harus sistematis, terprogram, dan kolaboratif agar setiap siswa benar-benar mencapai kompetensi perkembangan atau pola perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk berkembang secara optimal.

Indonesia mulai mengenal bimbingan dan konseling kisaran tahun 1960an, tertinggal sekitar 40 tahun lebih dari negara pencetusnya yaitu Amerika. Dilihat dari perkembangannya, praktik akuntabilitas di Indonesia belum semaju di Amerika, namun dari perkembangan akuntabilitas yang ada di Amerika terdapat beberapa implikasi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di Indonesia, yaitu: pertama, kompetensi guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan

konseling di Indonesia harus memiliki kompetensi untuk dapat melaksanakan praktik akuntabilitas, seperti yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, yang menjelaskan bahwa kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan akuntabilitas di antaranya adalah: menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; melakukan evaluasi proses, hasil, dan program bimbingan dan konseling, menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling; serta menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Guru bimbingan dan konseling harus aktif mencari, menambah, dan menggali pengetahuan yang diperlukan dengan mengikuti lokakarya, seminar, pelatihan kompetensi dan sumber lain yang dapat meningkatkan keterampilan guru bimbingan dan konseling dan berimplikasi pada kinerja guru bimbingan dan konseling dan akuntabilitasnya di sekolah. Dengan demikian, guru bimbingan dan konseling harus mampu menyediakan data hasil kinerja karena semua kegiatan dan tindakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa harus berbasis bukti. Guru bimbingan dan konseling harus mampu menyediakan data tentang efektivitas layanan bimbingan dan konseling dalam mengubah siswa, dan membuktikan bahwa perubahan positif siswa merupakan dampak dari bimbingan dan konseling yang telah diberikan guru bimbingan dan konseling.

Kedua, perguruan tinggi dan atau pendidikan profesi telah melihat peluang dari potensi tersebut, sehingga perlu mempersiapkan kurikulum yang tepat untuk menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktik bimbingan dan konseling yang akuntabel. Perguruan tinggi juga harus secara proaktif menyelenggarakan pelatihan, *coaching*, dan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas, harus disadari pula bahwa saat ini perguruan tinggi belum dapat menyediakan model akuntabilitas konseling yang aktual untuk kondisi di Indonesia.

Ketiga, organisasi bimbingan dan konseling, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dapat berperan aktif dengan mengadakan pelatihan

untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi bagi anggota-anggotanya terkait dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang akuntabel. Hal ini termasuk juga mengadakan pertemuan yang intens untuk dapat memproduksi naskah-naskah yang lebih produktif, misalnya panduan untuk melaksanakan BK yang akuntabel, panduan untuk mengevaluasi program bimbingan dan konseling, dan sebagainya.

Keempat, pelaksanaan penelitian bagi praktisi dan akademisi. Banyak ide yang dapat diambil dari akuntabilitas, karena isu tentang akuntabilitas akan selalu ada selama profesi guru bimbingan dan konseling tersebut ada. Oleh karena itu, potensi untuk melaksanakan penelitian tentang akuntabilitas semakin dibutuhkan.

Peran dan tanggung jawab guru bimbingan dan konseling telah mengalami perubahan sejak awal profesi guru bimbingan dan konseling dimulai yaitu pada tahun 1900-an, yang mencerminkan perubahan masyarakat pada umumnya. Perubahan ini telah menghasilkan harapan bahwa guru bimbingan dan konseling dapat menunjukkan keefektifan program bimbingan dan konseling serta intervensi sekolah yang digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa (Myrick, 2003). Program bimbingan dan konseling sekolah dapat mencapai tujuannya terkait dengan peningkatan kinerja akademik siswa, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hal tersebut memang benar adanya (Loesch & Ritchie, 2005).

Efektivitas program bimbingan dan konseling serta intervensi sekolah yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling untuk memenuhi tujuan program harus didokumentasikan melalui praktik akuntabilitas yang sistematis dan berkelanjutan. Meskipun banyak diskusi tentang pentingnya akuntabilitas guru bimbingan dan konseling, namun belum jelas sejauh mana guru bimbingan dan konseling kontemporer berpartisipasi dalam praktik akuntabilitas dan bagaimana bentuk dari praktik akuntabilitas tersebut. Definisi akuntabilitas juga telah berubah sejak tahun 1990. Pada tahun 1990, guru bimbingan dan konseling berpikir bahwa data pencacahan, menghitung jumlah sesi atau aktivitas layanan bimbingan dan konseling, menunjukkan akuntabilitas. Saat ini, selain kegiatan yang guru bimbingan dan konseling lakukan setiap hari, guru bimbingan dan konseling juga harus menunjukkan bagaimana kegiatan tersebut menghasilkan

perubahan atau dampak yang berarti bagi siswa. Dengan demikian, perlu adanya penegasan bahwa pengembangan diri yang dimiliki siswa benar merupakan hasil dari siswa tersebut memperoleh layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau terjadi karena faktor-faktor lainnya.

Akuntabilitas merupakan masalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Kedua aspek tersebut relevan dengan program bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling yang profesional memiliki tanggung jawab terhadap sistem akuntabilitas yang dirancang dengan baik. Guru bimbingan dan konseling menginginkan umpan balik atas pekerjaan mereka dan selanjutnya untuk dapat melakukan modifikasi jika diperlukan atau mempertahankan tindakan yang terbukti berhasil. Bertanggung jawab atas kinerja, pelaksanaan program dan hasil merupakan definisi dari akuntabilitas (ASCA, 2005).

Penggunaan data dan tindakan akuntabilitas yang kredibel akan memberikan manfaat tidak hanya dapat mengadvokasi posisi dan program bimbingan dan konseling, tetapi juga guru bimbingan dan konseling mendapatkan keterampilan dalam pengembangan profesional mereka (Stone & Dahir, 2007). Dengan kata lain, akuntabilitas dapat mendukung usaha guru bimbingan dan konseling untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling sekolah yang komprehensif. Komponen penting dari akuntabilitas adalah pengumpulan dan analisis data.

Data akuntabilitas memberikan bukti kepada *stakeholder* bahwa program bimbingan dan konseling sekolah membuat perbedaan (membawa perubahan) dalam prestasi belajar siswa. Ketika guru bimbingan dan konseling menghasilkan laporan yang menguraikan dampak langsung program bimbingan dan konseling terhadap prestasi siswa, guru bimbingan dan konseling memperkuat posisi mereka sebagai bagian integral dari keseluruhan tujuan sekolah. Oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling sangat perlu menerapkan akuntabilitas yang kredibel dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sehingga dapat menjadi guru bimbingan dan konseling yang akuntabel.

Namun hal ini tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal pada kenyataannya di sekolah. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh peneliti pada sekolah menengah di Lampung menunjukkan bahwa kebutuhan guru bimbingan dan konseling untuk berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi sangat tinggi, akan tetapi

banyak guru bimbingan dan konseling yang sulit melakukannya. Berbagai macam alasan guru bimbingan dan konseling tidak melaksanakan evaluasi program adalah munculnya anggapan bahwa kegiatan evaluasi adalah berat dan sulit, kurangnya pelatihan, kurangnya finansial dan sumber daya manusia, kendala waktu, tidak memahami kriteria pengukuran, dan adanya kekhawatiran dari konsekuensi-konsekuensi negatif dari evaluasi tersebut (Mujiyati, dkk., 2020).

Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling di Indonesia, yaitu dengan menetapkan regulasi dan membuat panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di berbagai jenjang pendidikan, serta penyelenggaraan seminar dan *workshop* tentang bimbingan dan konseling. Namun upaya tersebut, belum berdampak bagi kinerja guru bimbingan dan konseling dalam praktiknya di sekolah, terutama pelaksanaan akuntabilitas bimbingan dan konseling.

Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Suastini, Suhandana, & Yudana (2013) tentang kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling pada SMA se-kabupaten Tabanan mengimplikasikan urgensi kebutuhan pembinaan bagi para guru bimbingan dan konseling di sekolah untuk meningkatkan kinerja profesional mereka. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada kompetensi pelaksanaan penguasaan konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, kompetensi perancangan program bimbingan dan konseling, kompetensi penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, serta kompetensi kesadaran dan komitmen terhadap etika profesi pada SMA se-kabupaten Tabanan masuk ke dalam kategori yang rendah, yaitu kurang dari 20%. Hasil penelitian serupa yang dilakukan Fauziyah (2016) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru bimbingan dan konseling terhadap konsep dan praksis asesmen bimbingan dan konseling dalam kategori rendah (28 %).

Selain itu, evaluasi program bimbingan dan konseling merupakan komponen yang masih lemah dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di Indonesia (Badrujaman, dkk., 2015). Hal ini tampak dari minimnya guru bimbingan dan konseling/guru bimbingan dan konseling yang melakukan evaluasi terhadap program bimbingan dan konseling di sekolah. Penelitian yang

dilakukan Rachmalia (2006) mengenai pelaksanaan tugas pokok guru bimbingan dan konseling di kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, menunjukkan bahwa aspek evaluasi program bimbingan dan konseling belum banyak dilakukan, karena minimnya pengetahuan guru bimbingan dan konseling terkait dengan evaluasi. Studi lain yang memperkuat fakta bahwa pelaksanaan evaluasi BK masih rendah dilakukan oleh Lindah (2011) yang menemukan bahwa kualitas pelaksanaan evaluasi pada SMA di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sebesar 21.01% (pencapaian maksimum = 100%).

Pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling khususnya layanan dasar yang rendah di sekolah mengakibatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap program bimbingan dan konseling menjadi rendah (Badrujaman, dkk., 2015). Fenomena tidak adanya jadwal layanan bimbingan dan konseling di kelas merupakan indikasi rendahnya dukungan kepala sekolah terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling belum dapat memberikan keyakinan kepada siswanya mengenai pentingnya program bimbingan dan konseling (Husna, 2002; Pancanita, 2008). Bahkan menurut Buchori, di beberapa sekolah, guru bimbingan dan konseling dijauhi siswanya karena dipandang sebagai "polisi sekolah". Rendahnya kepercayaan terhadap program bimbingan dan konseling juga terjadi pada guru mata pelajaran yang seringkali memiliki persepsi yang kurang baik pada guru bimbingan dan konseling dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Lebih lanjut, Buchori mencatat, tidak jarang program bimbingan dan konseling hanya merupakan komponen pelengkap di sekolah sebagai persyaratan administrasi sekolah saja (Buchori, 2001).

Hasil pengumpulan data pada SMA dan SMK di Lampung juga menunjukkan bahwa kontributor yang signifikan terhadap minat guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan evaluasi adalah kurangnya model evaluasi program praktis yang tersedia bagi guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kebingungan tentang perbedaan antara evaluasi program dan akuntabilitas muncul untuk menghambat guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan evaluasi program yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan model bagi guru bimbingan dan konseling yang secara jelas mengkonsep evaluasi

program dan akuntabilitas yang memberikan dukungan untuk menetapkan evaluasi program sebagai standar praktik dalam bimbingan dan konseling. Selain itu, model evaluasi akuntabilitas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Melihat kondisi seperti ini, maka perlu dikembangkan sebuah model evaluasi yang mampu memenuhi kebutuhan evaluasi guru bimbingan dan konseling di sekolah, salah satu model evaluasi yang dapat dikembangkan adalah *accountability bridge model*.

Peneliti juga telah melakukan diskusi dengan perancang model yaitu Astramovich dan Coker melalui email. Diskusi mengenai model dilakukan sebagai bentuk pendalaman kajian peneliti terhadap model. Dari hasil diskusi dengan Coker, diperoleh informasi bahwa model tersebut muncul dari sebuah penelitian yang dilakukan dengan praktik guru bimbingan dan konseling di Nevada yang menyatakan (saat itu) bahwa sebenarnya tidak ada kerangka atau model tentang bagaimana melakukan evaluasi program. Oleh karena itu, *accountability bridge model* dirancang untuk membantu guru bimbingan dan konseling dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap efektivitas dan dampak dari layanan konseling secara komprehensif. Coker juga menjelaskan bahwa model tersebut belum diujikan di sekolah dan masih dalam bentuk kerangka kerja. Selain itu, Astramovich juga menjelaskan bahwa model yang dirancang tidak secara khusus membahas pertimbangan budaya dalam penerapan model. Perancang model juga menegaskan bahwa kegiatan guru bimbingan dan konseling dalam evaluasi program tidak memperhatikan demografi, sehingga jika peneliti tertarik mengembangkan *accountability bridge model* di Indonesia, khususnya di Lampung, dapat mempertimbangkan faktor demografi tersebut.

Accountability bridge model merupakan model evaluasi yang didesain untuk membantu guru bimbingan dan konseling merencanakan, menerapkan dan asesmen atau menilai keefektifan dan pengaruh layanan program bimbingan dan konseling yang dilakukan. *Accountability bridge model* merupakan kerangka kerja yang dapat membantu memfasilitasi guru bimbingan dan konseling dalam melakukan evaluasi program dan mengkomunikasikan hasil (Astramovich dan Coker, 2007).

Accountability bridge model dibagi menjadi dua bagian siklus yang terjadi bersamaan (siklus evaluasi program konseling dan siklus evaluasi konteks konseling). Kedua siklus tersebut menampilkan keselarasan berkelanjutan terus-menerus dari layanan tersebut berdasarkan pada hasil, saran dan respon pihak-pihak terkait atau para *stakeholder* atau pihak yang berkepentingan dan kebutuhan populasi atau siswa yang mendapatkan layanan tersebut. Guru bimbingan dan konseling sebaiknya memilih bagian dari model yang sesuai dengan situasi dan mudah diterapkan di sekolah, agar proses pelaksanaan program konseling sekolah dapat diukur dan direncanakan di masa yang akan datang (Mujiyati, Suherman, Ahman, dan Nurhudaya, 2020).

Hasil penelitian Whiston (Astramovich & Hoskins, 2013) menyatakan bahwa *accountability bridge model* efektif untuk evaluasi program bimbingan dan konseling serta dapat digunakan dalam evaluasi perbaikan program pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem yang lebih difokuskan pada komponen evaluasi, yang meliputi komponen kebutuhan dan *fiability*. Panduan untuk mengevaluasi akuntabilitas bimbingan dan konseling di sekolah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh *American School Counselor Association* (ASCA, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa urgensi pengembangan *accountability bridge model* terhadap pelaksanaan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling di sekolah merupakan topik yang layak diteliti dalam ilmu bimbingan dan konseling.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Akuntabilitas dipandang sebagai konsep penting dalam kehidupan suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Begitu juga dengan profesi guru bimbingan dan konseling yang membutuhkan tanggung jawab atas kinerjanya di sekolah. Guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan dan konseling harus akuntabel dalam menjalankan peran dan tugasnya di sekolah. Meskipun demikian, sebagian besar guru bimbingan dan

konseling di sekolah khususnya pada SMA dan SMK di Lampung belum memasukkan praktik akuntabilitas dalam program mereka.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah lemahnya kinerja akuntabilitas guru bimbingan dan konseling pada SMA dan SMK di Lampung. Kinerja akuntabilitas sangat berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Beberapa alasan guru bimbingan dan konseling menghindari aktivitas akuntabilitas, yaitu antara lain: guru bimbingan dan konseling tidak mengumpulkan data akuntabilitas karena takut di evaluasi dan konsekuensi negatif terhadap hasil pekerjaannya; kurangnya pelatihan guru terkait dengan pengukuran; kurangnya sumber daya keuangan dan manusia; kendala waktu; tidak mengetahui kriteria yang harus diukur. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga berpikir bahwa aktivitas akuntabilitas terlalu rumit dan sulit, tidak tahu dari mana untuk memulai atau mengakhiri, guru bimbingan dan konseling merasa kurang percaya terhadap kemampuannya untuk melaksanakan evaluasi, kurangnya pemahaman personil sekolah tentang tugas pokok dan fungsi guru bimbingan dan konseling di sekolah, dan kurangnya dukungan sistem sehingga menyebabkan kinerja akuntabilitas tidak berjalan dengan baik.

Kegagalan implementasi akuntabilitas banyak ditentukan oleh rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas, kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas, penurunan nilai-nilai normal, faktor budaya, rendahnya kualitas petugas/pejabat, krisis lingkungan, kelemahan hukum tentang akuntabilitas, usangnya teknologi, dan rendahnya standar hidup masyarakat (Thopedmir, 2009).

Model bimbingan dan konseling komprehensif menyebutkan bahwa sistem akuntabilitas merupakan bagian yang terkait dengan manajemen. Sistem akuntabilitas merupakan alat manajemen yang berfungsi untuk menyediakan informasi sebagai dasar pengembangan program dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat dikatakan memberikan kontribusi positif terhadap perubahan perilaku siswa jika guru bimbingan dan konseling mampu memberikan bukti dan data yang menunjukkan hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, teridentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan akuntabilitas bimbingan dan konseling yang menyebabkan lemahnya kinerja akuntabilitas bimbingan dan konseling di sekolah. Kondisi ini

mengisyaratkan perlunya dikembangkan model evaluasi program bimbingan dan konseling yang dapat mengatasi hal tersebut dengan mengembangkan *accountability bridge model*. Alasan penggunaan model karena keberhasilan guru bimbingan dan konseling dalam mengkomunikasikan data hasil evaluasi kepada *stakeholders* merupakan indikator dari akuntabilitas. Guru bimbingan dan konseling yang akuntabel dalam menjalankan tugasnya di sekolah membutuhkan pengalaman dan wawasan terkait evaluasi. Evaluasi merupakan inti dari akuntabilitas guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling perlu mengevaluasi jenis layanan yang diberikan dan hasil yang diperoleh menjadi dampak dari layanan yang harus dilaporkan kepada pihak-pihak terkait yang memperoleh manfaat dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Evaluasi kinerja merupakan sebuah alat untuk membandingkan keterampilan guru bimbingan dan konseling dan hasil layanan dengan standar yang ditetapkan. Hal ini diperkuat oleh Schellenberg (2008) yang mengatakan bahwa kajian tentang akuntabilitas guru bimbingan dan konseling selalu mengaitkan proses evaluasi di dalamnya.

Evaluasi merupakan komponen yang sangat penting dalam program bimbingan dan konseling untuk menjamin program itu sendiri. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan nilai suatu program, berbagai kegiatan di dalam program, dan para staf yang terlibat dalam program tersebut, untuk kemudian mengambil keputusan atau tindakan-tindakan di masa mendatang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Saat ini isu tentang akuntabilitas merupakan isu yang hangat dibicarakan pada dialog atau diskusi profesional. Pada bidang bimbingan dan konseling kebutuhan-kebutuhan tentang akuntabilitas sangat diperlukan. Guru bimbingan dan konseling bekerja dalam kerangka kerja dari suatu program bimbingan dan konseling yang komprehensif secara meningkat akan diminta untuk menunjukkan bahwa pekerjaannya memberikan kontribusi pada kesuksesan siswa, khususnya pada pencapaian prestasi akademik siswa. Namun tidak hanya itu, guru bimbingan dan konseling juga diminta untuk menunjukkan sebuah perbedaan dalam kehidupan siswa merupakan dampak dari program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan di sekolah.

Secara khusus, rumusan masalah penelitian ini dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seperti apa karakteristik kinerja akuntabilitas guru bimbingan dan konseling SMA SMK di Lampung?
2. Bagaimana bentuk kerangka kerja *accountability bridge model* yang diterapkan sekolah di Lampung?
3. Apakah *accountability bridge model* efektif dalam meningkatkan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling SMA SMK di Lampung?
4. Apakah pengetahuan, *self-efficacy*, dan keterampilan dalam mengevaluasi program berpengaruh terhadap akuntabilitas guru bimbingan dan konseling SMA SMK di Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menguji sebuah model yang secara empiris efektif untuk meningkatkan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling di sekolah. Secara operasional, tujuan umum penelitian ini dirinci ke dalam tujuan khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran karakteristik tentang pelaksanaan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling di Lampung.
2. Memperoleh gambaran tentang pengembangan model *accountability bridge model* yang diterapkan guru bimbingan dan konseling di Lampung.
3. Menguji efektivitas *accountability bridge model* dalam meningkatkan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling di Lampung.
4. Menguji seberapa besar pengaruh pengetahuan, *self-efficacy*, dan keterampilan dalam mengevaluasi program terhadap akuntabilitas guru bimbingan dan konseling di Lampung.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori, kebijakan, maupun praktik bimbingan dan konseling. Manfaat penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Manfaat/signifikansi dari segi pengembangan teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab tantangan terhadap pelaksanaan akuntabilitas

bimbingan dan konseling di sekolah, serta dapat menjadi salah satu referensi bagi guru bimbingan dan konseling/guru bimbingan dan konseling untuk mengembangkan dan mengimplementasikan evaluasi program bimbingan dan konseling dalam rangka meningkatkan kinerjanya sebagai guru bimbingan dan konseling yang profesional.

2. Manfaat/signifikansi dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi *stakeholder* dalam mengambil keputusan dan sebagai pertimbangan bagi penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling serta penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
3. Manfaat/signifikansi praktik bimbingan dan konseling, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif terhadap sudut pandang atau solusi dalam memecahkan masalah akuntabilitas guru bimbingan dan konseling di sekolah dengan berbasis bukti dan data, serta memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

E. Struktur Isi Disertasi

Disertasi ini diuraikan ke dalam lima bab. Bab I adalah pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur isi disertasi. Bab II adalah kajian teori, yang menjelaskan tentang filosofis akuntabilitas, kajian akuntabilitas dalam berbagai perspektif, orientasi penanaman nilai-nilai akuntabilitas guru bimbingan dan konseling di sekolah, kajian *accountability bridge model*, berbagai penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Bab III adalah metode penelitian, yang menguraikan tentang metode dan desain penelitian, lokasi, populasi, dan sampel penelitian, alur penelitian, teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, serta teknik analisis data. Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan tentang temuan-temuan penelitian serta argumen yang dikemas dalam pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian tersebut, sedangkan Bab V adalah simpulan dan rekomendasi, yang menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian dan menguraikan berbagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian.